

Sudinsos Jaksel Cari ODGJ BAB di JPO Semanggi

JAKARTA (IM)- Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan mencari pria yang nekat buang air besar di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Transjakarta Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (22/6). Diduga pelaku yang buang air besar di jembatan penyeberangan itu adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

"Dari (Dinas) sosial juga lagi menyelidiki dan mencari," ujar Kepala Sudinsos Jakarta Selatan, Bernard Tambunan kepada awak media, Jumat (23/6).

Menurut Bernard Tambunan, pihaknya juga bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) hingga pihak kelurahan setempat. Kemudian jika ditemukan, maka pihaknya akan membawa pelaku ke Rumah Sakit Duren Sawit lalu dicari keluarganya. Tetapi jika yang bersangkutan tidak punya keluarga maka akan dibawa ke panti. "Kalau ODJ tentu kita bawa dulu ke RS Duren Sawit dan cari keluarga. Tapi, kalau tidak ada keluarga ya kita bawa ke panti," terang Bernard Tambunan.

Sebelumnya, viral di media sosial seorang pria nekad melakukan buang air besar di JPO Transjakarta Semanggi, Jakarta Selatan. Dalam foto-

foto beredar di media sosial seorang pria dewasa tampak menurunkan celananya dan berjongkok di dekat pagar JPO. Diduga pria tersebut merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. "Diduga (pelaku) Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ pelakunya," ujar Camat Setiabudi Iswahyudi kepada awak media, Kamis (22/6) kemarin.

Menurut Iswahyudi dugaan tersebut berdasarkan dari pengakuan beberapa orang saksi yang ada di lokasi kejadian. Di antaranya keterangan dari para pedagang yang kerap berjualan di sekitar lokasi jembatan penyeberangan tersebut. Dari keterangan mereka pria yang viral itu diindikasikan sebagai ODGJ. "Informasi tukang kopi keliling dan tukang mondar-mandir ada dekat lokasi tersebut," jelas Iswahyudi.

Dalam keterangan foto yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi di JPO yang menghubungkan Halte Transjakarta Semanggi menuju Plaza Semanggi. Disebutnya, seorang pria tak dikenal itu tampak mondar-mandir lalu berhenti di pertengahan JPO. Kemudian pria tersebut membuka celananya, lalu jongkok dan buang air besar. ● yan

Ada Sekolah di Bawah Tol Cawang-Pluit, Warga: Muridnya Anak Kolong

JAKARTA (IM)- Sekolah Pondok Domba Kolong, demikian nama yang tertulis pada bangunan di bawah kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru, Jakarta Barat. Sekolah Pondok Domba berada di antara hunian tak laik milik warga, yang dibangun di kolong jalan tol. Berdasarkan pantauan di lokasi, tembok sekolah dicat dengan berbagai karakter hewan, rumah, rumput, hingga sungai di atas bukit. Sementara di sisi kiri, terdapat pintu kecil berkilir merah.

Menurut warga berinisial I (63), sekolah itu dipertunjukkan bagi anak-anak kolong. "Orang-orang yang sekolah di situ ya orang-orang sana. Yang sekolah, anak-anak kolong saja," ujar I, Jumat (23/6).

I menuturkan, sekolah itu kerap didatangi beberapa orang ber mobil mewah. Mereka yang datang juga membagikan sembako kepada warga. Namun, I tak mengetahui siapa orang-orang tersebut. Sementara itu, warga kolong bernama Budi (bukan nama sebenarnya) menyampaikan, pengurus sekolah membiarkan anak-anak tak mampu yang tinggal di kolong tol mendapatkan pendidikan di sana. "Sekolah Pondok Domba kan (pengurusnya) Nasrani, karena kita kan eggak melihat suku agama ya. Jadi orang Nasrani ini membela untuk menahang pembongkaran," kata Budi. "Karena kan sekolah ini dia (pengurus sekolah) yang biayain sampe SMP, SMA,

kuliah," lanjutnya lagi.

Sebelumnya, wartawan berupaya menemui salah satu pengurus Sekolah Pondok Domba bernama Indah. Akan tetapi, saat ditemui, Indah enggan memberikan pernyataan apa pun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat I, Junaedi mengatakan, pihaknya telah memanggil pengurus Sekolah Pondok Domba. Itu dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut soal sekolah tersebut. "Di awal dengan kami lakukan pendataan benar atau tidak di situ ada sekolah. Ketika benar ada sekolah, sekolah itu berizin atau tidak, begitu," ungkap Junaedi saat dikonfirmasi. Berdasarkan pendataan, tercatat 70 siswa yang bersekolah di Sekolah Pondok Domba. Mereka terdiri dari siswa taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Selain melakukan pendataan, pihaknya juga memanggil para relawan yang mengajar di sekolah ini.

Saat ditanya terkait relokasi sekolah, dia menyebut hal itu bukan wewenang Sudin Pendidikan. "Kalau bicara bakal dipindah atau bagaimana tentu bukan urusan Sudin Pendidikan ya. Tapi ketika itu ada sebuah kebijakan dipindahkan, kami akan ikut serta melakukan atensi kepada mereka," terang Junaedi. "Apa atensinya? Tentu kita arahkan kegiatan sampai ada anak-anak kita di sana. Walaupun anak-anak sekolah yang tidak berizin, mereka harus kita beri perhatian," imbuh dia. ● yan

Disbud DKI Gelar Pameran dan Talkshow Kain Tenun di Museum Tekstil

JAKARTA (IM)- Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta kembali menggelar Pameran Wastra dengan judul Menjalani Benang, Meniti Sukma: Wastra Tenun Bertuah dalam Siklus Daur Hidup.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Museum Tekstil dan Himpunan Wastraprema yang ke-47, serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kain tenun tradisional Indonesia Indonesia.

Kepala Dinas Kebudayaan DKI, Iwan Henry Wardhana mengatakan pameran berlangsung hingga 30 Juli, pada Selasa hingga Minggu pukul 09.00-15.00 WIB di Museum Tekstil, Jakarta Barat. Tiket masuk museum tersebut seharga Rp5.000 untuk dewasa, 3.000 rupiah untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak.

Selain itu, rangkaian kegiatan pameran dilaksanakan dengan beberapa acara, di antaranya seminar hybrid, workshop, dan talkshow untuk pecinta wastra (kain tradisional). "Di zaman modern yang serba praktis saat ini, rangkaian upacara daur hidup sudah jarang dilakukan yang hanya ada di beberapa tempat dan golongan tertentu saja sebagai ba-

gian dari tradisi. Oleh karena itu banyak wastra keperluan daur hidup tidak ditunen lagi dan pengetahuan tentang cara pembuatan serta penggunaannya secara perlahan mulai pudar. Harapannya, keberadaan wastra tersebut dapat diinformasikan kepada masyarakat dan dihadirkan dalam bentuk pameran wastra ini," ujar Iwan di Jakarta, Jumat (23/6).

Lebih lanjut, Iwan menerangkan, terdapat 85 buah koleksi kain tenun yang dipamerkan dan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Koleksi kain tenun berasal dari Pulau Sumatera hingga Nusa Tenggara yang merupakan koleksi dari Museum Tekstil, Rumah Wastra Jo Seda, dan para kolektor seperti Sri Sintasari Iskandar, Aswin Wirjadi, Tjok Istri Ratna, Dini Jusuf dan Viliidius Siburian. Menurut Iwan, keindahan dalam kesederhanaan dan kemewahan yang memancar dari setiap lembar kain ini merupakan kata tanpa suara yang menyeru betapa kaya dan agung budaya wastra Indonesia. ● yan

4 | Metropolis



PEMERIKSAAN HEWAN KURBAN DI JAKARTA

Pedagang Imam (kiri) dan Nurdin (kiri) menunjukkan surat bebas penyakit usai pemeriksaan kesehatan hewan sapi kurban di tempat penampungan hewan kurban kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (23/6). Sudin Suku Dinas (Sudin) Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menjamin kesehatan hewan kurban yang dijual di Jakarta terbebas dari Penyakit Mulut Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD).

Pemprov DKI Janji Tindak Pemilik Rumah DP Rp0 jika Terbukti Sewakan Unit

Pemprov DKI berencana memanggil pemilik unit tersebut untuk diminta klarifikasi pada Selasa (4/7). "Iya (dipanggil) pemiliknya. Tanggal 4 Juli 2023 jam 09.00 WIB di Kantor UPDP," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistyningrum.

JAKARTA (IM)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji akan menindak tegas pemilik rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, jika terbukti menyewakan huniannya sebagai tempat kos.

Untuk diketahui, unit

rumah yang diresmikan pada 2019 itu diduga disewakan menjadi tempat kos seharga Rp 1 juta per bulan. "Kami kasih peringatan (pemilik hunian) nanti jika terbukti (menyewakan)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu-

kiman DKI Jakarta, Retno Sulistyningrum saat dikonfirmasi, Jumat (23/6).

Peringatan akan diberikan sebanyak tiga kali. Jika peringatan tak diindahkan, Pemprov DKI akan menindak pemilik rumah tersebut. "Kalau tetap tidak memenuhi peringatan, pasti kami akan tindak, selesaikan," kata Retno.

Retno mengatakan, saat ini jajarannya tengah menginvestigasi persoalan hunian tersebut. Rumah yang disorot dalam sebuah video itu telah didatangi dan terbukti kosong. "Temuan di lapangan, ya unit itu kosong," kata Retno.

Pemprov DKI berencana memanggil pemilik unit tersebut untuk diminta klarifikasi pada Selasa (4/7). "Iya (dipanggil) pemiliknya. Tanggal

4 Juli 2023 jam 09.00 WIB di Kantor UPDP," ucap Retno.

Sebelumnya, sebuah video yang memasark unit rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa disewakan sebagai tempat kos beredar di media sosial.

Video tersebut diunggah di salah satu akun Instagram. Namun, kini konten itu telah dihapus. Dalam video itu terlihat seisi rumah, mulai dari toilet, kamar, hingga beberapa fasilitas elektronik. "Rumah sewa apartemen murah di Jakarta Timur," demikian narasi yang dituliskan dalam video.

Video itu juga dilengkapi dengan voice over (VO) yang menjelaskan fasilitas yang bakal didapat penyewa. "Kalian yang lagi cari kosan yang nyaman dan harganya murah. Rekomendasi kos mu-

rah di Jakarta Timur. Kamar mandi di dalam, sudah ada kulkas dan kitchen set," kata seseorang dalam VO. "Iya, dengan fasilitas yang bagus itu, tahu enggak sih, sewa atau ngekos di apartemen ini cuma Rp 1 juta free IPL," kata dia.

Menanggapi video itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, rumah DP Rp 0 harus sesuai peruntukan. Heru berjanji akan menertibkan rumah yang justru disewakan menjadi tempat kos. "Ini harus sesuai aturan dong. (Langkahnya) harus ditertibkan. Itu kan DP 0 supaya warga bisa mendapatkan rumah terjangkau, para milenial yang belum dapat rumah, itu bisa dapat rumah," kata Heru Budi. ● yan

DPRD DKI: Proyek Mangkrak di Ancol Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

JAKARTA (IM)- Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan kasus mangkraknya sejumlah proyek di Ancol bisa masuk ke pengadilan apabila ada indikasi penyelewengan dalam penggunaan anggaran.

"Kalau memang ada indikasi ke sana pasti (lapor penegak hukum) karena ini kan terkait dengan penggunaan uang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebagai BUMD," kata Ismail di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Selain itu, Ismail juga mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani masalah Ancol kepada Ketua DPRD DKI Jakarta. Setelah disetujui, pansus tersebut akan menelusuri permasalahan Ancol secara lebih detail.

Jika ditemukan indikasi penyelewengan dana, maka DPRD DKI Jakarta bisa merekomendasikan kasus ini ke penegak hukum untuk ditangani secara pidana.

"Kita sebatas merekomendasikan proses mitigasi berikutnya mungkin ditangani penegak hukum," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Windarto mengungkap aula konser musik di mal ABC sudah bisa digunakan publik setelah perselisihan antara dua perusahaan di dalamnya berhasil diselesaikan.

Kini, jelas Windarto, setelah kasus kedua perusahaan selesai di pengadilan, mal ABC berikut lokasi aula konser yang ada di lantai atas sudah bisa digunakan publik. "Sekarang sudah beroperasi, seingat saya Desember 2022 sudah ada kegiatan konser," kata Windarto saat ditemui awak media usai rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Windarto menjelaskan akar kisruh pengoperasian mal Ancol Beach City (ABC) disebabkan adanya perselisihan antara PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT Mata Elang Internasional Stadium (MEIS) Stadium.

Windarto mengaku tidak mengetahui secara persis penyebab dari perselisihan yang berlangsung sejak tahun 2014 tersebut. Windarto juga menandatangani PT WAIP adalah pihak yang diajak kerja sama dengan PT PJAA untuk membangun

dan mengelola Music Stadium di mal ABC. Sedangkan PT MEIS adalah pihak yang menyewa tempat pertunjukan milik mal ABC.

Kisruh itu, berlangsung hingga beberapa tahun dan menyebabkan tempat pertunjukan yang disediakan mal ABC tidak bisa beroperasi. Bahkan, PT PJAA sempat digugat oleh PT MEIS ke pengadilan akibat permasalahan ini.

"Ada mungkin tujuh sampai delapan tuntutan kepada hukum dari pengadilan dengan mereka. Namun yang jelas Ancol tidak punya hubungan langsung dengan PT MEIS, hubungannya kami hanya dengan PT WAIP," jelas dia.

Ancol, lanjut Windarto, sempat meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada 2015 terkait dengan permasalahan ini.

Pendapat hukum tersebut pun menyatakan bahwa pagajuan pengoperasian sudah bisa dilakukan setelah sengketa dengan PT MEIS dan PT WAIP selesai di pengadilan. "Pengambilalihan akhirnya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PT WAIP dan PT PJAA dan tidak merugikan PT PJAA," jelas Windarto. ● yan

DLH Larang Buang Limbah Hewan Kurban ke Badan Air

JAKARTA (IM)- Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melarang panitia kurban dan masyarakat umum untuk membuang limbah hewan kurban ke badan air.

Pasalnya, limbah dari potongan hewan tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan.

Badan air yang terdiri dari got, selokan, dan kali atau sungai harus dijaga tetap bersih dan tidak terkontaminasi limbah. Sisa-sisa limbah yang dilarang dibuang ke Badan Air dapat berupa jeroan hingga isi perut hewan kurban.

Limbah tersebut berbahaya karena bisa menyebarkan penyakit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menegaskan larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hingga penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh limbah potongan hewan kurban setelah disembelih.

"Praktik membuang limbah kurban sembarangan ini merupakan praktik yang berbahaya, karena potongan jeroan hewan menjadi media berkembangnya pato-

gen yang dapat menularkan penyakit. Limbah ini bisa membuat kondisi badan air jadi tercemar," tegas Asep dalam keterangan resminya, Jumat (23/6).

Terutama pembuangan ke badan air, menurut Asep, juga membawa akibat yang sangat buruk bagi lingkungan. Patogen penyebab penyakit ini dapat menularkan penyakit sejenis hepatitis, tifus, dan penyakit mata dan kuku (PMK).

"Apalagi terjadi cukup masif, ini dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas," tegas Asep.

Selain itu, Asep juga menjelaskan pembuangan limbah potongan hewan kurban ke badan air bisa merusak ekosistem yang ada. "Sederhananya ikan di Badan Air akan mati jika limbah potongan hewan kurban dibuang ke sana," kata Asep yang menyarankan limbah dapat dikuburkan atau dijadikan pakan Maggot BSF.

"Semoga dengan tidak membuang limbah kurban sembarangan dan bisa mengelolanya dengan baik, bisa membuat ibadah kurban kita makin lebih berkah," tutup Asep. ● yan



FESTIVAL MAKANAN BINGEN LORONG RODA PALEMBANG

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas (kiri) didampingi Ketua Pelaksana Festival Makanan Bingen Lorong Roda Muhammad Mardho Till (kedua kiri) meninjau lokasi pelaksanaan Festival Makanan Bingen Lorong Roda di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (23/6). Kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan Bank Mandiri terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus melestarikan budaya khususnya makanan dengan pelatihan bagi UMKM seperti teknik pembuatan kue, literasi akses pasar melalui platform digital dan upaya pengemasan promosi produk melalui foto.

Sesuai dengan PMK No. 207/PMK.010/2015, dengan ini Kami PT Airpay International Indonesia menyatakan bahwa telah menghapus Piutang Tak Tertagih dengan total sebesar Rp. 746.786.905,- untuk tahun pajak 2022. Rincian daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih diserahkan ke KPP Madya Jakarta Selatan II.

Sesuai dengan PMK No. 207/PMK.010/2015, dengan ini Kami PT Shopee International Indonesia menyatakan bahwa telah menghapus piutang tak tertagih dengan total sebesar Rp. 1.854.638.528.410,- untuk tahun pajak 2022. Rincian daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih diserahkan ke KPP Madya Jakarta Selatan II.